

**PENGARUH PRIVATISASI SAHAM PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN : STUDI PADA BUMN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA**

S K R I P S I



Oleh :

YUSUF ABDILLAH
NIM. 01810291644

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

ABSTRAKSI

Penelitian yang dilakukan pada sebelas Perusahaan BUMN yang mengalami privatisasi sejak tahun 1991 sampai dengan 2001 bertujuan untuk mengetahui pengaruh divestasi saham pemerintah di perusahaan BUMN apabila ditinjau dari perspektif kinerja keuangan perusahaan.

Dengan menggunakan uji komparatif antara rasio sebelum dan setelah divestasi akan dapat diketahui pengaruh / dampak kinerja keuangan perusahaan BUMN dari pelaksanaan divestasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa divestasi yang selama ini dilakukan pemerintah sampai dengan tahun 2001 memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan signifikan terjadi pada rasio likuiditas perusahaan utamanya aktiva lancarnya dalam hal menutupi kewajiban – kewajiban lancarnya dan proporsi dana yang berasal dari perusahaan dibandingkan dari luar perusahaan.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	3
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Landasan Teori	5
2.1.1. Pengertian BUMN	5
2.1.2. Pengertian Privatisasi.....	7
2.1.3. Rasio Keuangan Sebagai Proksi Kinerja Keuangan	9
2.1.4. Privatisasi BUMN Sebagai Suatu Alternatif Perbaikan Kinerja	14
2.2. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Rancangan Penelitian	24
3.2. Obyek Penelitian.....	24
3.3. Populasi dan Sampel	25
3.4. Definisi Operasional Variabel	27
3.5. Metode Analisis Data.....	30
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
4.1. Kondisi Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	35
4.2. Analisis Uji Wilcoxon Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.	BUMN yang Diprivatisasi Sebelum Tahun 2001	24
TABEL 4.1.	Hasil Perhitungan Cash Ratio BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	34
TABEL 4.2.	Hasil Perhitungan Curent Ratio BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi ..	35
TABEL 4.3.	Hasil Perhitungan Debt To Equity Ratio (DER) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	37
TABEL 4.4.	Hasil Perhitungan Total Asset Turnover (TATO) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	38
TABEL 4.5.	Hasil Perhitungan Return On Investment (ROI) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	39
TABEL 4.6.	Hasil Perhitungan Return On Equity (ROE) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	41
TABEL 4.7.	Hasil Perhitungan Earning Per Share (EPS) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	42
TABEL 4.8.	Hasil Perhitungan Net Worth To Total Liability (NWTL) BUMN Sebelum dan Setelah Privatisasi	43
TABEL 4.9.	Hasil Pengujian Wilcoxon Signed Rank Test Dua Tahun Sebelum dan Satu Tahun Setelah Privatisasi.....	45
TABEL 4.10.	Hasil Pengujian Wilcoxon Signed Rank Test Dua Tahun Sebelum dan Dua Tahun Setelah Privatisasi	48
TABEL 4.11.	Hasil Pengujian Wilcoxon Signed Rank Test Satu Tahun Sebelum dan Satu Tahun Setelah Privatisasi	50
TABEL 4.12.	Hasil Pengujian Wilcoxon Signed Rank Test Satu Tahun Sebelum dan Dua Tahun Setelah Privatisasi	52

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Alur Penelitian	32
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 UMUM

- 1.1. Bumn yang Diprivatisasi Sebelum Tahun 2001

LAMPIRAN 2 DATA AKTIVA , PASIVA DAN MODAL BUMN YANG MENGALAMI PRIVATISASI

- 2.1. Data Aktiva , Pasiva Dan Modal Bumn yang Mengalami Privatisasi
(Dalam Jutaan Rupiah)
- 2.2. Data Hutang Lancar, Total Hutang dan Equity Perusahaan Privatisasi
(Dalam Jutaan Rupiah)
- 2.3. Data Equity + Hak Minoritas, Penjualan Bersih, EAT Dan EPS
Perusahaan Privatisasi (Dalam Jutaan Rupiah)
- 2.4. Data Cash Rasio, Current Rasio, DER Dan TATO Perusahaan Privatisasi
(Dalam Jutaan Rupiah)
- 2.5. Data ROI, ROE Dan NWTL Perusahaan Privatisasi
(Dalam Jutaan Rupiah)

LAMPIRAN 3 RASIO - RASIO SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI

- 3.1 Cash rasio sebelum dan setelah privatisasi
- 3.2 Current rasio sebelum dan setelah privatisasi
- 3.3 DER sebelum dan setelah privatisasi
- 3.4 TATO sebelum dan setelah privatisasi
- 3.5 ROI sebelum dan setelah privatisasi
- 3.6 ROE sebelum dan setelah privatisasi
- 3.7 NWTL sebelum dan setelah privatisasi
- 3.8 EPS sebelum dan setelah privatisasi

LAMPIRAN 4 HASIL PERHITUNGAN SPSS

- 4.1 Output cash rasio
- 4.2 Output current rasio
- 4.3 output DER
- 4.4 output TATO
- 4.5 output ROI
- 4.6 output ROE
- 4.7 output EPS
- 4.8 output NWTL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis yang terjadi tahun 1997, berdampak kepada kebangkrutan perbankan Indonesia akibat adanya kredit macet dan kesulitan likuiditas yang dialami oleh perbankan itu sendiri. Krisis yang terjadi inilah yang cukup berdampak kepada perekonomian Indonesia secara makro. Hal ini dapat dilihat dari besaran PDB pada tahun 1998 sebesar 13,7 %, nilai tukar (nominal) rupiah pada tingkat Rp 11.625,- pada bulan Agustus 1998, tingkat laju inflasi pada tahun 1998 sebesar 77,6 % dan tingkat suku bunga (sertifikat Bank Indonesia, SBI 28 hari) sebesar 70,7 % pada bulan Agustus 1998. Krisis juga telah memaksa Pemerintah untuk mengubah peranannya dalam perekonomian. Setelah krisis, Pemerintah lebih memusatkan kegiatannya pada produksi jasa-jasa publik yang memang merupakan tugas pokoknya. Sementara itu, kegiatannya untuk memproduksi komoditi privat melalui BUMN dan lembaga seperti Bulog semakin dikurangi. Pergeseran kegiatan ekonomi Pemerintah sekaligus mengubah peranan APBN. Melalui pengetatan anggaran deregulasi ekonomi, fungsi alokasi faktor-faktor produksi semakin banyak diserahkan pada mekanisme pasar dan peranan APBN lebih difokuskan sebagai instrumen kebijakan makro (Anwar Nasuiton , 2000).

Deregulasi ekonomi melalui perubahan peranan APBN yang lebih menfokuskan sebagai instrumen kebijakan makro inilah yang akan mendorong adanya privatisasi oleh pemerintah. Dalam perjanjian dengan IMF, Indonesia komit untuk melakukan privatisasi 13 BUMN selama tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000. Ke 13 BUMN tersebut adalah PT Telkom, PT Indosat, PT aneka tambang, PT Tambang Timah, PT Semen Gresik, PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, PT Pelindo II, PT Pelindo III, PT Angkasa Pura, PT Jasa Marga, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara IV, meskipun begitu yang terealisasi hanyalah beberapa perusahaan BUMN saja (LP3ES, 2003).

Kebijakan terkait privatisasi inilah yang sering menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari terbentuknya dua kelompok berkepentingan yaitu kelompok penentang privatisasi dan kelompok setuju pelaksanaan privatisasi. Berbagai isu terkait waktu penjualan, harga penjualan, manfaat penjualan bagi Negara, isu nasionalisme (apabila terdapat investor luar negeri) serta manfaat privatisasi bagi perusahaan BUMN tersebut dikemukakan oleh pihak penentang privatisasi. Sedangkan disisi pihak yang setuju privatisasi beralasan berupa kebutuhan dana APBN, transparansi, netral daripada kebijakan berbau politis, tambahan dana bagi perusahaan, transfer teknologi, efisiensi yang mengarah kepada perbaikan kinerja.

Privatisasi dalam tingkat global kesemuanya diawali oleh dua pemain yaitu Mikhail Gorbhacev dan Margareth Thatcher. Margaret Tatcher membongkar peranan negara kesejahteraan, sehubungan dengan pekerjaan, perawatan medis, jaminan sosial dan sebagainya yang dianggap sebagai tanggung jawab Negara. Sedangkan Mikhail Gorbhacev membongkar ekonomi kekuasaan dari Negara sosialis (Ibrahim, 1998). Di Indonesia sendiri, privatisasi telah berlangsung sejak 1991, yaitu ketika PT Semen Gresik melakukan “*Initial Public Offering*” (IPO) yang kemudian diikuti PT Telkom dan PT Bank BNI.

Langkah privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah juga tiada lain terkait kondisi kinerja BUMN yang buruk bahkan cukup membebani anggaran keuangan Negara. Pada tahun 1988, BUMN yang kurang dan tidak sehat berjumlah 129 perusahaan, sedangkan yang sehat dan sehat sekali hanya 60 perusahaan. Tahun 1997 jumlah BUMN yang kurang dan tidak sehat turun menjadi 86 perusahaan, sedangkan yang sehat dan sehat sekali menjadi 74 perusahaan. Tetapi, bila dibandingkan antara pertambahan nilai asset BUMN dengan pertambahan laba sebelum pajaknya, hasilnya akan lain. Walaupun dalam periode 1988-1997 nilai asset BUMN rata-rata meningkat 17 % per tahun, laba sebelum pajak yang diperolehnya tidak banyak berubah. Laba sebelum pajak BUMN pada 1988 berjumlah Rp 5,2 trilyun. Sepuluh tahun kemudian hanya meningkat menjadi Rp 11,8 trilyun. Selama sepuluh tahun tersebut, laba sebelum pajak BUMN rata-rata

hanya meningkat sebesar 10,5 %. Peningkatan laba yang lebih rendah daripada peningkatan nilai asset itu jelas mengungkapkan semakin merosotnya produktivitas asset BUMN. Return on asset (ROA) BUMN dalam periode 1988-1997 memang merosot cukup drastis, yaitu dari 4,2 % menjadi 2,6 %. Berdasarkan fakta tersebut, langkah privatisasi merupakan salah satu alasan kuat untuk meningkatkan kinerja BUMN. Melalui privatisasi diharapkan terjadi transformasi nilai, ide, prinsip, dan semangat kewirausahaan kedalam BUMN yang akhirnya diharapkan akan mendorong kinerjanya lebih baik dan profitable (Sunarsip, 2002).

Berbagai studi tentang privatisasi menunjukkan hasil positif bagi perbaikan kinerja BUMN. Beberapa kajian terhadap pengalaman beberapa Negara yang telah melaksanakan privatisasi seperti Narjesh Bobakri dan Jean-Calude Cosset (1998) terhadap BUMN di 21 negara berkembang, Mokhtar Kattab (1998) terhadap BUMN di Mesir, Porta dan Silanes (1997) terhadap BUMN di Meksiko dan Dowlah (1996) terhadap BUMN di Bangladesh dimana rata-rata memberi suatu arah kesimpulan yang hampir sama bahwa adanya perbaikan kinerja perusahaan BUMN setelah pelaksanaan privatisasi.

1.2. Pokok Permasalahan

Meskipun kegiatan privatisasi BUMN di Indonesia telah lama dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1995 terhadap PT Semen Gresik dan beberapa studi terhadap pengalaman beberapa negara yang menilai positif privatisasi, namun polemik tentang manfaat privatisasi bagi negara, masyarakat dan perusahaan BUMN masih terus berlanjut. Selain itu kondisi kinerja BUMN yang tergolong buruk yang dibuktikan dari peningkatan laba yang lebih rendah daripada peningkatan nilai asset mengungkapkan tentang merosotnya produktivitas asset BUMN.

Dalam hal ini perlu dilaksanakan pengkajian kinerja BUMN tersebut agar dapat memberi gambaran terhadap pengaruh privatisasi. Pengkajian dilakukan dengan menilai manfaat privatisasi jika ditinjau dari perspektif kinerja. *Bagaimana kondisi kinerja keuangan BUMN sebelum dan setelah pelaksanaan*

privatisasi dan apakah akan terdapat perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan setelah dilaksanakan privatisasi.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh privatisasi saham pemerintah di perusahaan BUMN dari perspektif kinerja keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- Memberikan landasan tambahan bagi pihak manajemen dalam memandang masalah privatisasi, khususnya bagi pihak manajer investasi didalam memilih berbagai alternatif portofolio investasi dari dana yang dimilikinya (khususnya atas divestasi saham Pemerintah).
- Sebagai bahan informasi bagi penentu kebijaksanaan didalam memilih berbagai alternatif pengelolaan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah demi perbaikan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.
- Memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi didalam mempelajari manajemen investasi , khususnya yang terkait dengan perusahaan BUMN.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang menggunakan penelitian dalam bidang yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian BUMN

BUMN menurut Inpres no. 5 tahun 1988 tentang pedoman penyehatan dan pengelolaan BUMN adalah badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh negara, yang tidak seluruhnya dimiliki oleh negara tetapi status disamakan dengan BUMN, dan digolongkan sebagai berikut :

1. Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu.
2. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara.
3. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis.
4. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.
6. Usaha bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

Didalam penelitiannya, Kwik Kian Gie (1994) menemukan BUMN melaksanakan multi fungsi sebagai berikut :

1. *Agen pembangunan*, artinya bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Orientasinya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, karena barang dan jasa tersebut bersifat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.
2. *Pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan*, seperti bidang transportasi umum dan air bersih, listrik, telekomunikasi, minyak dan gas. Komoditi tersebut harus disediakan dengan harga yang cukup rendah (atau gratis sama sekali)

3. *Instrumen penjaga harga*, BUMN dipertahankan dalam tingkat persaingan yang ketat dengan swasta, karena ingin dipakai sebagai instrumen penjaga harga.
4. *Menghasilkan laba / keuntungan* adalah salah satu dari fungsi BUMN sebagai produsen, yang dalam pasar bersaing secara ketat dengan banyak produsen swasta.
5. *Benteng pertahanan persaingan ekonomi global*, dalam kondisi globalisasi ekonomi, maka pemerintah dapat menggerakkan semua potensi yang ada, agar dominasi barang impor itu dapat disaingi.

Pelaksanaan fungsi BUMN berdasar Undang-Undang No. 9 tahun 1969, sebenarnya terkait dengan bentuk dan karakteristik, sebagai berikut:

1. *Perjan*, makna usahanya adalah pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, (berdasarkan UU terbaru no 19 tahun 2003 tentang BUMN) maka semua BUMN berbentuk perjan harus berubah status menjadi perum atau persero pada tahun 2005.
2. *Perum*, makna usahanya adalah melayani kepentingan umum. Usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan *economy cost-accounting principles and management effectiveness* serta bentuk pelayanan.
3. *Perusahaan perseroan*, makna usahanya adalah memupuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis.
4. *Perusahaan bentuk lain (PBL)*, timbul dikarenakan ada beberapa BUMN yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok Perjan, Perum dan perseroan.

Sedangkan perjalanan bisnis BUMN sejak merdeka sampai sekarang, dapat ditinjau dalam beberapa periode : pertama (1945-1959), BUMN dipakai untuk mengembangkan usaha public utilities dan hajat hidup orang banyak, bersifat strategis dan modal pemerintah. Periode kedua (1959-1974), pengambilalihan semua perusahaan Belanda melalui Undang-Undang No. 85 tahun 1958, maka peranan Negara semakin dominan atau disebut masa Etatisme, jumlah perusahaan yang dinasionalisasi sebanyak 557 buah.

Periode ketiga (1974-1982), naiknya harga minyak menyebabkan pemerintah melakukan ekspansi besar-besaran mendirikan BUMN, kondisi tersebut hanya berjalan satu dasawarsa, karena harga minyak merosot tahun 1983.

Periode keempat (1982-1990-an), globalisasi semakin populer dan tidak ada negara yang mampu menolaknya. Era globalisasi dalam segala bentuk kehidupan masyarakat menjadi tidak populer, sehingga muncullah deregulasi dan debirokratisasi, yang dipelopori oleh Inggris. Pada periode ini, sisa-sisa sektor public utilities yang dicanangkan untuk BUMN mengalami transformasi menuju swastanisasi. Sedangkan periode lanjutan, arah swastanisasi terhadap BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum begitu jelas (Ibrahim, 1997).

2.1.2. Pengertian Privatisasi

Masterplan reformasi BUMN yang dikeluarkan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, 1999, mendefinisikan privatisasi sebagai “penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan hal tersebut umumnya dicapai ketika mayoritas saham perusahaan dialihkan atau dalam jangka waktu dekat akan dijual kepemilikannya kepada swasta”.

Menurut Steve H. Hanke, privatisasi adalah “is the transfer of assets and service function from public to private hand. It include, therefore, activities that range from selling state-owned enter-prise to contracting out public service with private contractor”.

Dengan demikian privatisasi mengandung makna perubahan peran pemerintah dari sebagai pelaksana menjadi sebagai regulator dan promotor dari kebijaksanaan dan penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral. Perubahan peran pemerintah ditunjukkan dalam bentuk berupa perubahan kepemilikan pemerintah kepada swasta melalui tindakan penjualan sahamnya.

Oleh sebab itu, didalam mengambil data dalam penelitian, Penulis tidak berdasar kepada penjualan saham pemerintah dari kepemilikan sebesar 100%

melalui tindakan IPO, melainkan terhadap segala tindakan penjualan saham pemerintah di BUMN (meski pada perusahaan yang sama)..

Berdasarkan pasal 7 UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

1. Industri / sektor usahanya kompetitif
2. Industri / sektor usaha yang unsure teknologinya cepat berubah.

Sedangkan sebagian asset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan / atau yang berdasarkan Undang-Undang kegiatan usahanya harus dilaksanakan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Maksud pelaksanaan privatisasi, berdasar penjelasan pasal 74 . UU no 19 tahun 2003, dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan keterbukaan (*disclousere*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses Go Publik, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik dalam tingkat lokal maupun global.

Dari aspek ekonomi, tolok ukur keberhasilan privatisasi BUMN sangat jelas. Dari sisi fiskal, keberhasilan privatisasi diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan pemasukan bagi negara, baik dari divestasi maupun dari penerimaan pajak pasca privatisasi. Dari sisi efisiensi, tolok ukurnya adalah apakah (eks) BUMN tersebut mampu menjadi badan usaha yang lebih efisien dibandingkan sebelumnya (Edy Priyono : 2003).

Sedangkan tujuan dari privatisasi BUMN, menurut Anwar Nasution (1999) dimaksudkan untuk mencapai berbagai sasaran strategis :

1. Merupakan bagian dari program korporisasi BUMN, pemberdayaan dan penyehatan kinerjanya.
2. Penghapusan hak monopoli dan oligopoly yang dilakukan secara khusus kepada BUMN merupakan bagian dari kebijakan untuk menyehatkan persaingan pasar.
3. Persaingan pasar yang lebih sehat itu merangsang BUMN menekan biaya produksi dan tingkat harga.
4. Persaingan pasar yang lebih sehat itu merangsang BUMN meningkatkan mutu produk maupun kualitas layanan.
5. Privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah guna membelanjai defisit anggaran belanjanya dan memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri.
6. Privatisasi BUMN merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi alokasi faktor-faktor produksi guna meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.
7. Untuk merangsang terjadinya alih teknologi. Sasaran ini diupayakan dengan memilih pemodal asing itu diantara perusahaan yang memiliki reputasi baik ditingkat internasional. Alih teknologi ini terjadi pada proses produksi, manajemen, keuangan dan pemasaran.
8. Merangsang perubahan kultur korporat termasuk sikap dan perilaku serta etos kerja direksi maupun karyawan perusahaan. Ini dapat diharapkan dari interaksi komisaris, direksi maupun karyawan BUMN dengan mitra strategis dunia.

2.1.3. Ratio Keuangan sebagai Proksi Kinerja Keuangan

Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (Van Horne dan Wachowicz, 1997 :133). Sedangkan kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen.